

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Pada tahun 1926 mulai terjadi konflik antara pemerintah AS dan penduduk Mindanao disebabkan oleh kebijakan AS yang menggabungkan pemerintah yang berada di Luzon dengan yang ada di Mindanao melalui kebijakan Bacon Bill. Kebijakan tersebut menuai protes dari masyarakat dan datus di Mindanao namun pemerintah AS tetap melaksanakan kebijakan tersebut dan Filipina merdeka dengan memasukkan wilayah Mindanao sebagai wilayah administratif dari negara Filipina. Kemerdekaan Filipina disambut baik oleh masyarakat Filipina kecuali wilayah Mindanao yang merasa tidak satu identitas dengan orang Luzon yang non Muslim. Hal ini menyebabkan konflik yang mulai terjadi pada 4 Juli 1946, yaitu terjadi konflik antara pemerintah Filipina dengan masyarakat Mindanao yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah Filipina yang ingin mengapus hukum-hukum Islam dan diganti dengan hukum yang berlaku di Filipina.

Konflik ini menimbulkan banyak penyerangan yang terjadi di Filipina Selatan, pada akhirnya terjadi penyerangan terhadap kantor pemerintah Filipina di Manila membuat pemerintah sakit hati dan tidak mau mengakui hukum adat di Mindanao. Sikap tersebut membuat Nur Misuari membentuk MNLF (Moro National Liberation Front) pada tahun 1969 sebagai

kelompok pejuang di Mindanao. Kedekatan antara pendiri MNLF dengan pemimpin Libya yaitu Muammar Khadafi ketika itu membuat MNLF memiliki kekuatan dalam melakukan pemberontakan. Kelompok ini dibentuk sebagai gerakan masyarakat Mindanao untuk merdeka dan keluar dari Filipina yang bertanggung jawab atas kekerasan yang dialami masyarakat Mindanao dalam hal politik dan ekonomi. Malaysia dan Libya merupakan negara pendukung MNLF dengan memberikan pelatihan kepada militan-militan dan dana kepada MNLF. Pada tahun 1971, OKI beserta Pemimpin Libya ketika itu Muammar Khadafi menjadi fasilitator konflik. Pada era ini Filipina dikuasai oleh Presiden Ferdinand Marcos yang menjabat pada kurun waktu tahun 1976-1986. Hal yang dicapai adalah kesepakatan dengan pihak Mindanao yaitu melalui perjanjian Tripoli tahun 1976 di Libya yang merupakan hasil dari negosiasi antara pemerintah Filipina dengan MNLF. Perjanjian ini mengalami kegagalan setelah pemerintah Filipina dianggap tidak mengakui atau menaati isi perjanjian.

Pada masa pemerintah Cory Aquino dari tahun 1986-1992 menghasilkan perjanjian Jeddah Accord tahun 1987, Cory Aquino digantikan oleh Fidel Ramos (1992-1994) dimana Fidel Ramos kembali meneruskan negosiasi antara pemerintah Filipina dengan MNLF yang kembali menghasilkan perjanjian antara keduanya dan terjadi konsolidasi antara MNLF dan pemerintah Filipina yang menghasilkan final peace agreement (FPA).

Pasca FPA kondisi di Mindanao tidak lantas membaik belum genap 1 tahun disini Nur Misuari

menyatakan kekecawaannya melakukan perundingan tersebut, karena terlalu banyak miscalculasi dan oportuniste dalam FPA. Terutama di tingkat masyarakat katolik karena Nur Misuari dianggap masyarakat katolik bekas pemberontak jika lantas memimpin maka dikhawatirkan akan melakukan kebijakan yang diskriminatif bahkan represif terhadap masyarakat katolik di mindanao.

Tetapi konflik mengalami buntu dan tidak mencapai titik temu di tahun 2017 OKI muncul sebagai mediator penyelesaian konflik yang mana dengan diadakan sidang di Abidjan, Pantai Gading 10-11 Juli 2017 Dalam studi kasus ini OKI berperan sebagai mediator dalam konflik Moro Mindanao Filipina Selatan. Dimana kita disini *mediasi* adalah proses perdamaian dengan menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik dan juga membuat perdamaian untuk pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Menjadi mediator dalam konflik juga mempunyai harus memperhatikan syarat –syarat tertentu :

1. Mediator berperan memfasilitasi perundingan antara pihak-pihak yang kesulitan menemukan jalan tengah untuk mencapai perdamaian.
2. Mediator harus berasal dari pihak yang netral tidak berpihak pada kubu manapun, mediator juga harus mengarahkan pihak-pihak menuju kesepakatan
3. Mediasi bersifat sukarela

4. Pihak yang bersangkutan tetap bertanggung jawab : mediator bias mengarahkan negosiasi. Tetapi tanggung jawab tetap atas segala keputusan tetap ditangan pihak yang bersengketa.
5. Mediasi bersifat rahasia : tidak untuk disampaikan kepada pihak lain

Sidang di Abidjan berlangsung secara lancar yang mana sidang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berkonflik serta mendapat tinjauan dari pihak lain seperti Arab Saudi dan Indonesia.

1. OKI menekankan kepada kedua belah pihak untuk menghormati perjanjian tripoli 1976 dan Final Peace Agreement sebagai dasar resolusi konflik yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni antara pemerintah filipina itu sendiri dan pihak MNLF
2. Menegaskan kembali bahwa comprehensive agreement (CBA) bangsamoro juga merupakan pemenuhan persyaratan mewujudkan perdamaian di Mindanao, dan juga merupakan langkah besar untuk menciptakan perdamaian yang abadi di Mindanao
3. OKI menyambut inisiatif pemerintah untuk mencari solusi unkonstitusional yang telah dihadapi dalam upaya mencapai perdamaian selama kurun waktu 40 tahun ini.
4. OKI menyarankan bahwa dasar hukum bangsamoro di sahkan dibawah hukum

